

"Semar Super"

Perlirungan Belum Selesai...

SUPERSEMAR. Siapakah berani memain-mainkannya di waktu lalu? Dia termasuk salah satu "kata keramat", tabu untuk dipersoalkan, sama seperti beberapa kata lain seperti "dwifungsi ABRI", "militerisme", ataupun "kekayaan keluarga Soeharto". Kini, "Supersemar" dipeserahkan menjadi *Semar Super*—judul tontonan ketoprak lucu oleh pelawak Basuki, Mandra, dan kawan-kawannya, yang ditayangkan stasiun televisi swasta, Selasa (7/10) malam lalu.

ARUS perubahan politik di negeri ini telah menjingkir-hilangkan dominasi pemakaian dan penafsiran bahasa. Telah terjadi pelucutan makna-makna yang selama ini ditutup-tutupi dan dijadikan serba sakral, seperti "Supersemar" tadi. Dengan kata lain, sebuah proses desakralisasi memang tengah terjadi.

Pada bulan Oktober yang biasa disebut "Bulan Bahasa", ber-

sema Dr Ariel Heryanto, antropolog sosial sekaligus pengajar di National University of Singapore (NUS), *Kompas* memperbaikangkannya soal bahasa Indonesia tidak hanya sebatas kata, frasa, dan kalimat, tetapi juga asumsi, kerangka berpikir serta rasionalitas. Itu yang disebut oleh Ariel sebagai *discourse* atau wacana.

"Perubahan bahasa mungkin saja sudah terjadi lebih awal dan

lebih serius sementara *status quo* politik masih beraksara pinggang. Tetapi pada saat tata politik ambrok, maka percepatan perubahan politik mengejar dan mengungguli perubahan bahasa," kata Ariel.

Contohnya kita-kita, ungkapannya "revolusi sosialisme" yang merupakan mantera rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno,

(Bersambungan ke halaman 12 kol 1-5)

(Sambungan dari halaman 1):

ta atau kalimat, bukan pula sejarah sosial atau politik sebuah atau beberapa buah teks. Yang dibahas dan diaduk-aduk di situ adalah proses terbentuknya kata-kata itu yang diandaikan berlandaskan sejumlah asumsi. Hanya mereka yang dapat menggapai asumsi dasar itu dapat melakukan "dekonstruksi".

Ariel mencontohkan, katanya dulu ada pengagum Soekarno yang marah-marah ketika Sekretariat Negara menuduh Soekarno sebagai Marxis. Peristiwa itu terjadi di seputar masa ketika Megawati mulai naik daun. "Kepada pengagum Soekarno yang marah-marah itu saya bertanya: 'Kok marah kenapa? Memangnya Marxis itu jelek? Memangnya Soekarno menganggap Marxis itu busuk? Dengan marah-marah itu bersertai kamu masuk dalam perangkap asumsi dasar Orde Baru tentang Marxisme,'" cerita Ariel.

Contoh yang lain, petani Keung Ombo di masa rezim Orde Baru pernah menggugat Bupati

Boyolali karena menuduh mereka "ET" dan "tidak bersih lingkungan". Publik pada waktu itu terpesona, di zaman "kecemasan militer dan Orde" ada petani yang menggugat pemerintah yang militer. Itu saja, kalau dinalar lebih jauh, gugatan itu sekaligus memperkuat hegemoni dan wacana Orde Baru, bahwa dituduh "berbau komunis" itu sama dengan cemar, pendosa, dan macam-macam pokoknya lebih pendosa dari koruptor, pembunuh, pemborong dan seterusnya.

Oleh karenanya, dalam strategi pelucutan wacana itu pantes dicatat apa yang diberitakan secara kurang mencolok oleh sebuah surat kabar beberapa waktu lalu, bagaimana sebuah organisasi politik di Semarang menyengkal tuduhan pengusa militer setempat, bahwa mereka "menunggangi" aksi protes yang terjadi di wilayah itu. Mereka menyengkal sebagai menunggangi: sebaliknya memang se-mata-mata menggerakkan demonstrasi, berdemonstrasi menentang militerisme. (Kalau ar-

gunan mereka diungkapkan dalam bahasa sehari-hari mungkin bunyinya: "Gue tidak menunggangi, tetapi benar-benar menyalakan diri menentang militerisme").

TELAAH pada tingkat wacana menyngkut hubungan bahasa dan kekuasaan ini memang telah lama menarik perhatian para pemikir kebudayaan. Sebuah buku berjudul *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (editor: Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Mei 1996) misalnya, mencoba merangkum pemikiran para penulis dari Benedict Anderson, Goenawan Mohamad, Hilmar Farid, Ignas Kleden, sampai Taufik Abdullah.

Dalam buku itu, editor telah memberi pengantar cukup mendai, untuk melukiskan bagaimana signifikannya telaah mengenai hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Mengutip isyarat dari Evert Vedung (*Political Reasoning*, 1982) misalnya, mereka mengatakan, "Tidaklah

Pertarungan — —

ketika Soekarno ambrok, Soeharto sudah bangkit, perbaikan resmi pemerintah baru itu itu adalah "demikian menyatakan revolusi sosialisme". I dalam praktiknya, jelas yang kerjakan Orba adalah "revolusi kapitalisme". Perlahan-lahan baru kemudian kata "sosialisme (kecuali "sosialisme religius dan "revolusi" (kecuali revolusi dalam dunia mode dan busana) menjadi kata-kata tabu.

"Artinya kita senantiasa terikat oleh warisan bahasa dari rezim lama pada saat mau bicar tentang sesuatu yang baru. Aki batnya kita tergagap-gagap, dan perubahan itu tertatih-tatih. Kalaus bahasa kita baru secara total, tidak ada yang mengerti. Dengan kata lain itu bukan bahasa, tetapi semacam kode-kode dalam rumus computer science," kata Ariel.

PENDEKATAN terhadap persoalan bahasa pada pengertian *discourse* atau wacana, mencoba membongkar bukan susunan ka-

mengada-adanya jika dikatakan bahwa jauh sebelum sistem reproduksi material dioperasikan, Orde Baru terlebih dahulu menjelaskan dirinya menjadi rezim tafsir dan bahasa."

Warisan bahasa Orde Baru yang kuit mencengkeram setelah dicekokkan selama lebih dari 30 tahun benar-benar masih belum bisa begitu saja dihapuskan. Penguasa khususnya tentara masih mempertahankan dengan habis-habisan politik wacana mereka, misalnya dengan "strategi kambing hitam", dan sebaliknya masih kedemnya banyak orang kalau dituduh "kiri", "menunggangi", dan seterusnya.

Reformasi berjalan tertatih-tatih karena digantai pertarungan wacana, yang belum sepenuhnya direbut oleh mereka yang mengklaim diri sebagai reformis. Di sini timbul pertanyaan, sebetulnya arus perubahan berikut terbatasnya daya jangkau perubahan sosial politik di Indonesia saat ini, adakah dibabkan belum radikalnya perubahan berbahasa dan berimajinasi kita? (hre/redan)